

IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BENTUK BANTUAN PANGAN NON TUNAI TAHUN 2020 DI KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Juan Apri Sihombing¹

¹ Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara
e-mail: aprihombing@gmail.com

Abstract

One of the policy established by the government to reduce the burden on the community in meeting basic needs is the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT). This study aims to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Sorkam District, Central Tapanuli Regency. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation techniques. Determination of informants using purposive sampling technique. The results of the research regarding the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Sorkam District, in Interorganizational Communication; The socialization carried out by the implementing actors has been carried out properly and sustainably, namely before the launch of the BPNT program through E-Warong in Sorkam District and monthly socialization by the companion party to the target group. Implementing Characteristics; The process of implementing the BPNT policy in Sorkam District has been optimal and is felt by the community. However, the behavior of implementing agents in service still needs to be improved. Social, economic and political conditions; the social situation is still not good because there are still some residents who are illiterate so that in conducting transactions the BPNT program has difficulty.

Keywords: *Implementation, policy, Non-Cash Food Aid, Central Tapanuli*

Abstrak

Salah satu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Sorkam, Secara Komunikasi Interorganisasional; Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakandengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program BPNT melalui E-Warong di Kecamatan Sorkam dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Karakteristik Pelaksana; Proses implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Sorkam sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan masih harus diperbaiki. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik; keadaan sosialnya masih bisa di katakan belum baik karena masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program BPNT mengalami kesulitan.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, Bantuan Pangan Non Tunai, Tapanuli Tengah

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang ada diberbagai negara termasuk negara ini, dan kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi kemiskinan dan perlu dicarikan perspektif yang baru atau yang berbeda untuk melihat, menafsirkan dan memaknai apa yang dinamakan dengan kemiskinan. Kemiskinan Indonesia yang multidimensional ini mencakup kemiskinan dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dalam dimensi sosial, politik, dan budaya, kemiskinan dalam segala dimensi yang ada baik pendidikan, sejarah, kemiskinan dalam dimensi sosiol-politik (wacana), kemiskinan yang berdimensi pendidikan, agama, budi pekerti, serta kemiskinan dalam dimensi perdamaian dunia (hubungan bilateral atau diplomasi). Proses pembangunan di Indonesia dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu dimensi makro yang menggambarkan bahwa bagaimana perubahan suatu masyarakat dipengaruhi oleh institusi negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya, sedangkan yang kedua adalah dimensi mikro yaitu proses pembangunan yang terjadi dipengaruhi oleh individu dan kelompok masyarakat itu sendiri. Pendapat lain mengatakan bahwa kemiskinan terbagi dalam dua kategori yaitu kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Indonesia sangat membutuhkan tata kelola yang lebih baik di masa mendatang demi terwujudnya kesejahteraan rayat.¹

Kemiskinan kultural dimaknai sebagai akibat dari adanya karakter budaya dan etos kerja masyarakat yang lemah, sementara kemiskinan struktur dipandang sebagai akibat dari terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang timpang. Pemerintah turut serta mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dengan landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (struktural-mikro) Sedangkan disisi lain, masyarakat sebagai individu atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi perubahan itu sendiri memerlukan keterbukaan budaya maupun peningkatan etos kerja yang selaras dan terarah (mikro-kultural).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,14 juta atau 9,66% dari total penduduk Indonesia yang tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia. Angka ini mengalami penurunan menjadi 24,79 juta orang atau kemiskinan di Indonesia. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dll Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah Non Cash Food Assistance Program. BPNT bukan merupakan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya.

Sedangkan Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin

¹ Anggusti, Martono, and Yansen Anggusti. 2020. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK MENUJU 100 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA (2045)". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):38-52. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.37>.

melalui pendistribusian beras 15 Kg/KK/bulan dengan harga Rp 1.600,- per kg dititik distribusi atau penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp. 110.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut-warong.

Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang ada pada kluster pertama, yaitu tentang kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program Bantuan Pangan Non Tunai mulai dilaksanakan dan disalurkan pada tahun 2017 di 44 kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh kota dan kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai.

Pemerintah memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan secara khusus dituangkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung pada Pasal 1 ayat 1 "Penanganan Fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara."² Berdasarkan hasil uraian di atas, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi dan efektivitas kebijakan pemerintah melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2020 di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum kepustakaan ditambah data lapangan dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi³ serta kemudian didukung dengan sejumlah referensi yang memadai dengan objek penelitian.

C. Pembahasan

Kondisi Umum Kecamatan Sorkam Sebagai Salah Satu Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Sorkam merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak sekitar 35 Km dari Kota Sibolga. Letak Sorkam tidak terlalu jauh dari Barus, dimana Barus kita kenal sebagai daerah yang pertama kali dijajaki oleh Islam pada abad ke- 7. Jarak antara Barus dengan Sorkam Barat sekitar 25 Km, tidak terlalu jauh perbedaan budaya rutinitas antara Barus dengan Sorkam. Kecamatan ini merupakan kawasan pesisir yang memiliki kawasan

³Amir, H.. 38.558 Warga Kabupaten Tapanuli Tengah Terima Bantuan Non Tunai. <https://tapanuli.sindonews.com> tanggal 13 November 2020

ekosistem terumbu karang yang salah satunya terdapat di kawasan pantai Binasi dan sebagian besar penduduk di kawasan tersebut bekerja sebagai nelayan.

Terumbu karang mempunyai peran yang sangat penting dalam ekosistem perairan pesisir, terutama bagi biota laut yang hidupnya saling berasosiasidengan terumbu karang. Terumbu karang berperan sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak, sebagai tempat tinggal (habitat), tempat mencari makan (feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat pemijahan (spawning ground) bagi berbagai biota yang hidup di terumbu karang atau sebaliknya. Kecamatan Sorkam berada di Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian 0-16 M diatas permukaan laut. Tuhan menganugerahi Kecamatan Sorkam dengan secarik daya tarik tersendiri, yaitu terdapat sebuah pantai bernama "Pantai Binasi" terletak di Desa Pasar Sorkam. Pancaran pantai biru hasil hamparan ombak Samudra Indonesia sangat memukau menambah pemandangan Pantai Binasi menjadi sangat eksotis. Berkunjung ke tanah Sorkam tanpa merasakan alunan angin dan percikan ombak dari arah laut samudera akan sangat menyesal seumur hidup.

Pantai Binasi yang terletak di Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu kawasan wisata yang ramai dikunjungi oleh pengunjung setiap harinya, sebagian besar pengunjung di kawasan tersebut berasal dari luar daerah, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat di lingkungan tersebut untuk membuka usaha seperti membuka warung, rumah makan, dan penjualan cendera mata atau souvenir, sehingga kawasan tersebut merupakan penunjang ekonomi masyarakat sekitarnya. Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut bekerja sebagai nelayan penangkap ikan dan yang lainnya berjualan di sekitar pantai. Penduduk di Kecamatan Sorkam didominasi oleh Suku Batak Toba, Mandailing dan Minang yang beragama Islam dan dan beragama Kristen.

Peninggalan peradaban ataupun kerajaan yang menjadi situs bersejarah tidak terlalu eksis di daerah ini, terdapat sebidang Istana Raja Sorkam dahulu yang saat ini sudah direhabilitasi oleh keturunannya dan makam Raja-Raja Sorkam. Tetapi pembukuan tentang hal diatas kurang diminati oleh sejarawan, kemungkinan disebabkan usia Sorkam masih relatif mudamdibandingkan situs-situs sejarah lainnya. Berbeda dengan Barus, Barus kaya akan peninggalan-peninggalan sejarah yang terkenal sampai kepenjuru Tanah Air, salah satunya adalah Prasasti Tamil mengagendakan bahwa bangsa Tamil juga pernah berjuanda di Barus. Selain itu, di Barus juga terdapat dua makam (Papan Tinggi dan Mahligai) yang menurut sejarawan bahwasanya Islam pertama sekali masuk ke Indonesia pada abad 7 M. Selain eksistensi Islam, Kecamatan Sorkam juga memiliki kisah menarik tentang seorang tokoh pejuang kemerdekaan ketika Belanda melancarkan invasi yang kita kenal dengan istilah Agresi Militer Belanda.

Setelah kemerdekaan, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai daerah otonom dipertegas oleh pemerintah dengan Undang undang darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan pembentukan otonom daerah Kabupatenkabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 19 tahun 2007 maka ditetapnkan hari jadi Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 24 agustus 1945. Kabupaten Tapanuli Tengah pertama kalinya atas 4 kecamatan, yaitu : Sibolga, Lumut, Sorkam dan Barus. Sampai saat ini jumlah Kecamatan di kabupaten Tapanuli Tengah mencapai 20 Kecamatan. Kecamatan Sorkam sudah sejak awal kemerdekaan Indonesia dan hingga pada saat ini telah dipimpin 30 (tiga puluh) periode kepemimpinan yang mana 18 (delapan belas) kali periode dipimpin oleh Asisten Wedana dan 12 (dua belas) kali periode dipimpin oleh Camat.

Batas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yangmemiliki luas 2.194,98 Km² (219.498 Ha), yang terletak pada koordinat

1°11'00" - 2°22'0" lintang utara, serta 98°07' - 98°12' BT Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Parmonangan (Kabupaten Tapanuli Utara).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kolang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sorkam Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 20 kecamatan dengan jumlah penduduk mencapai 324.006 jiwa dan kepadatan penduduk 148 jiwa/km². Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 2.194,98 km² atau sekitar 3,03% dari luas Provinsi Sumatera Utara (72.516,69 km²).



Visi dan Misi Kantor Kecamatan Sorkam kabupaten Tapanuli Tengah

Visi adalah gambaran atau cita-cita yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi masa depan. Misi adalah cara yang di tempuh oleh organisasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Demikian halnya dengan pemerintah Kecamatan Sorkam. Dalam menjalankan roda organisasi pemerintah Kecamatan berpegang pada Visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten. Jadi Kecamatan tidak mempunyai Visi dan Misi yang spesifik. Visi tersebut adalah "Terciptanya Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien Sert Kesadaran Masyarakat Yang Tinggi Dalam Mewujudkan Negeri Wisata Sejuta Pesona". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas pembinaan dalam pelayanan, sehingga aktif dalam pelaksanaannya, proporsional dan transparansi.
- Meningkatkan kualitas proses Pelayanan yang aspiratif melalui pengadaan pendukung sarana dan prasarana, koordinasi, integrasi antar pelaku pembangunan daerah.
- Meningkatkan kualitas kesadaran dalam membangun yang tepat guna dan tepat sasaran dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal serta menumbuh kembangkan potensi daerah.
- Meningkatkan pembinaan masyarakat untuk berakhlak baik, mulia dan untuk mencapai cita-cita Pembangunan dalam Konsep Pariwisata Tapanuli Tengah.

Struktur Organisasi Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah

Setiap Departemen atau Organisasi, keberadaannya sangat penting sekali, baik kelancaran maupun efektivitas Departemen atau Organisasi yang bersangkutan. Oleh karena

itu, struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan setiap tugas seseorang di dalam organisasi, sehingga jelas batasbatasnya, hubungannya, wewenangnya dan tanggung jawabnya dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di samping itu struktur organisasi tersebut juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi wilayah kecamatan Sorkam karena dengan adanya struktur organisasi maka kegiatan-kegiatan yang ada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan dapat dilakukan secara teratur dan terarah.

Tugas Dan Fungsi Kantor Kecamatan Sorkam

Berdasarkan skema struktur organisasi, maka tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian di Kantor Camat Sorkam adalah sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan, camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah yang diserahkan langsung oleh pemerintah Kabupaten.
- Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
- Pelaksanaan Koordinasi terhadap seluruh unit kerjadi kecamatan
- Pelaksanaan urusan kesekretariatan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

b. Sekretaris Camat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi, memberikan pelayanan teknis administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh satuan kerja dilingkungan kantor kecamatan yang meliputi surat-menyurat dan arsip, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan, umum dan perlengkapan, kehumasan dan protokol serta menyusun laporan atas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan., sekretaris kecamatan juga mempunyai fungsi yaitu :

- Pelaksanaan urusan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan urus surat menyurat dan arsip, hukum, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga. Pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan urusan kehumasan dan protocol
- Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran
- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan tatalaksana
- Pelaksanaan pensunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

c. Sub Bagian Umum Dan Perlengkapan

- Penyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Biro Umum dan Perlengkapan.
- Penyelenggarakan penyempurnaan dan penetapan bahan/data di bidang urusan umum;
- Penyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan di bidang penyelenggaraan bidang umum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Penyelenggarakan penetapan penyusunan standard norma dan kriteria penyelenggaraan urusan umum

- Menyelenggarakan pembinaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengendalian dan kebijakan dalam menyelenggarakan urusan Bidang Umum, Bagian Rumah Tangga serta Bagian Pengadaan dan Perawatan.
- Menyelenggarakan penetapan penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang umum, rumah tangga serta Bagian Pengadaan dan Perawatan.
- Menyelenggarakan konsultasi dan asistensi dalam menyelenggarakan urusan umum.
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan urusan bidang umum, rumah tangga serta Bagian Pengadaan dan Perawatan.
- Menyelenggarakan pengkajian dan analisa terhadap penyelenggaraan urusan umum.
- Menyelenggarakan klarifikasi terhadap penyelenggaraan urusan umum.
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pengawasan penyelenggaraan urusan umum sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Menyelenggarakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan umum.
- Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan standard yang ditetapkan.
- Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas fungsinya.
- Menyelenggarakan penetapan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

d. Subbagian Keuangan Dan Kepegawaian

- Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
- Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggung jawaban atas barang-barang inventaris.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dinas.
- Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan.
- Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat.
- Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulaipenempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/ Janji Pegawai, Gaji Berkala, kesejahteraan pegawai, usulan mutasi dan pemberhentian pegawai, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkup Badan Kepegawaian Daerah.

e. Kasi Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat yang meliputi pemerintahan umum, kelurahan dan desa, melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pembinaan politik dalam negeri, pembinaan supremasi hukum dan administrasi pertanahan serta melaksanakan urusan pelayanan umum disamping itu juga mempunyai fungsi yaitu :

- Pelaksanaan penyusunan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum kelurahan dandesa.
- Pelaksanaan penyusunan program pembinaan administrasi dan pelaporan perkembangan kependudukan dan catatan sipil serta inventarisasi kekayaan kecamatan ada kelurahan/desa.

- Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan supremasi hukum dan administrasi pertanahan serta kekayaan, kebersihan, pertamanan dan sanitasi lingkungan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat yang meliputi pelaksanaan pembinaan dan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu juga menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan aparat ketertiban dan polisi pamong praja.
- Pelaksanaan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta tertib perizinan.

g. Kasi Pembangunan Masyarakat Desa

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengumpulkan dan menyiapkan bahan teknis perencanaan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas jalannya program pembangunan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan dibidang perekonomian yang meliputi pembinaan produksi, distribusi dan lingkungan hidup. Seksi pembangunan juga mempunyai fungsi yaitu:

- Pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta pembinaan penyelenggaraan pembangunan
- Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan pembangunan.
- Pembinaan perekonomian menyangkut produksi dan distribusi yang meliputi penyelenggaraan pembinaan perikanan, perkreditan rakyat, koperasi dan usaha kecil, perindustrian dan perdagangan, usaha informal, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan serta peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat.

h. Kasi Kesejahteraan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis, melakukan penyusunan rencana dan program serta kegiatan pembinaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, mental spritual dan kegiatan urusan kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat juga mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi bantuan sosial, pemberdayaan perempuan, KB dan kesehatan masyarakat.
- Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan serta kepemudaan dan olahraga.
- Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan dan kesralainnya.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

i. Kasi Pertamanan Penerangan Dan Kebersihan

- Pengumpulan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Penyusunan kegiatan di bidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.

- Pelaksanaan pengelolaan pengaturan di bidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan di bidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, pengendalian teknis di bidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Pelaksanaan perijinan di bidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum.

Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana pelayanan adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam melaksanakan pekerjaan dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan kantor Kecamatan Sorkam. Dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Camat Sorkam yaitu 1 unit mobil dinas dan 2 unit motor dinas, komputer sebanyak 2 unit, meja sebanyak 5 buah, kursi sebanyak 7 buah, televisi sebanyak 1 buah, lemari arsip 3 buah, papan struktur Kecamatan 1 buah dan 1 buah papan pengumuman. Dimana sarana dan prasarana dalam keadaan baik. Data di atas menunjukkan bahwa minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Camat Sorkam. Minimnya sarana dan prasarana tersebut tentunya mempengaruhi kinerja aparat dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun dalam memberikan pelayanan.

Implementasi dan Efektivitas Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Sorkam Tahun 2020

Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu penerima Peserta/penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai melalui Keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015.

DT-PFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data, yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No.284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017 ditetapkan oleh Menteri Sosial. KPM Bantuan Pangan Non Tunai 2017 adalah keluarga yang namanya termasuk di dalam DPM. DPM diserahkan kepada Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial. Bank Penyalur kemudian membukakan Rumah Rekening berdasarkan DPM. Rumah Rekening akan berubah menjadi Akun Elektronik Bantuan Pangan setelah proses pendaftaran peserta selesai. Apabila KPM yang namanya terdaftar dalam DPM telah memiliki rekening untuk penyaluran program Bantuan Sosial lain, maka rekening tersebut dapat digunakan untuk menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai. Untuk setiap KPM, DPM memuat informasi nama kepala keluarga, nama pasangan kepala keluarga, nama anggota keluarga lainnya, alamat tinggal keluarga, nomor induk kependudukan (NIK) (jika ada) dan

kode unik keluarga. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi dalam ketepatan sasaran bantuan sosial, Kecamatan Sorkam menjadi salah satu wilayah yang turut mempersiapkan diri dalam pelaksanaan penerimaan bantuan dimaksud.

Tentunya struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Jika birokrasi rumit, maka implementasikan kebijakan juga tidak akan berjalan dengan baik.⁴ Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal yang penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksanapun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan komplek. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (ekosospol), terlebih di era otonomi daerah⁵ dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang terjadi saat ini.⁶ Pengaruh faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik ini sebenarnya menunjuk kondisi atau keadaan lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini menilai sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan public terutama dalam pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai. Lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Sekalipun dampak dari sistem-sistem ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, sistem-sistem ini mungkin mempunyai efek mendalam terhadap pencapaian badan pelaksana. Peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sorkam.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan seperti yang digambarkan di atas, sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Di Negara lain BPNT dikenal dengan istilah Non Cash Food Assistance Program. BPNT bukan merupakan

⁴ Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.

⁵ Naibaho, Rinsofat, Hisar Siregar, and Tri Dennis Boy Silitonga. 2021. "IMPLEMENTASI DANA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA LOBUSIREGAR II KECAMATAN SIBORONG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA)". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (01):80-92. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.211>.

⁶ Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.

kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin.

Pelaksanaan di Indonesia diharapkan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan BPNT secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2020 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan yang berkelanjutan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu masyarakat miskin yang rawan pangan, agar mereka mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Untuk melihat Implementasi Program BPNT disalurkan kepada KPM di Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah, maka peneliti mengangkat beberapa indikator menurut Meter dan Horn yaitu Komunikasi Interorganisasional, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik serta Disposisi atau Sikap Pelaksana.⁷ Karakteristik Pelaksana; Proses implementasi kebijakan BPNT di Kecamatan Sorkam sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan masih harus diperbaiki. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik; keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program BPNT mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di juga tidak mengalami masalah. Disposisi atau sikap pelaksana; implementor bahwa pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program BPNT yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Semua pelaksana yang terlibat sebenarnya sudah menjalankan tupoksinya masing-masing hanya saja ada pihak implementor enggan melakukan tugas yang diembannya.

D. Kesimpulan

Secara Komunikasi yaitu koordinasi dan komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh para pihak aktor pelaksana sudah dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan yaitu sebelum diluncurkannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong di Kecamatan Sorkam dan sosialisasi setiap bulan oleh pihak pendamping kepada kelompok sasaran. Sehingga komunikasi dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di semua pihak sudah berjalan dengan baik. Karakteristik pelaksana dalam proses implementasi kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai melalui Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) di Kecamatan Sorkam sudah optimal dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerima bantuan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi perilaku agen pelaksana dalam pelayanan belum ramah dan masih harus diperbaiki. Kondisi Sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan. Karena keadaan sosial, ekonomi dan politik dapat mendukung bahkan sebaliknya. Di Kecamatan Sorkam keadaan sosialnya masih bisa dikatakan belum baik karena masih terdapat beberapa warga yang mengalami buta huruf sehingga dalam melakukan transaksi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui e-Warong mengalami kesulitan. Untuk keadaan ekonomi masyarakat masih bisa dikatakan stabil dan keadaan politik di juga tidak mengalami masalah. Disposisi atau sikap pelaksana implementor bahwa pihak-pihak yang terlibat memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nantinya dapat mencapai tujuan dengan baik. Sehubungan dengan itu, perlu adanya pendampingan yang lebih mengenai kondisi sosial yang kurang mendukung dengan

⁷ Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta perlu adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Daftar Pustaka

- Amir, H.. 38.558 Warga Kabupaten Tapanuli Tengah Terima Bantuan Non Tunai.
<https://tapanuli.sindonews.com> tanggal 13 November 2020
- Anggusti, Martono, and Yansen Anggusti. 2020. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM RANGKA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK MENUJU 100 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA (2045)". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 1 (01):38-52. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.37>.
- Naibaho, Rinsofat, Hisar Siregar, and Tri Dennis Boy Silitonga. 2021. "IMPLEMENTASI DANA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA LOBUSIREGAR II KECAMATAN SIBORONG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA)". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2 (01):80-92.
<https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.211>.
- Simamora, Janpatar. "Reformasi Birokrasi, Good Governance dan Etika Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, Vol. 10, No. 1 (2013): 39-60.
- Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 23, No. 1 (2011): 221-236.
- Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Una, Sayuti. *Pedoman Penulisan Penelitian*, (Edisi Revisi), cet Ke-2, Jambi : Syari'ah Press, 2014,
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Wahab, A, S. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Soaial Secara Non Tunai.
- Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.